

PROSIDING SEMINAR NASIONAL 2017
HIMPUNAN SARJANA KESUSASTRAAN INDONESIA
KOMISARIAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Sastra:

MERAJUT **KEBERAGAMAN**
Mengukuhkan **Kebangsaan**

Editor: Dr. Wiyatmi, M.Hum. | Dwi Budiyanto, M.Hum. | Kusmarwanti, M.Pd., M.A.

Sastra:
MERAJUT KEBERAGAMAN
Mengukuhkan **Kebangsaan**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prosiding Seminar Nasional 2017

Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia

Komisariat Universitas Negeri Yogyakarta

Sastra:
MERAJUT KEBERAGAMAN
Mengukuhkan **Kebangsaan**

Pembicara Utama:

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.

(Universitas Negeri Yogyakarta)

Manneke Budiman, Ph.D.

(Universitas Indonesia)

Dr. Wening Udasmoro

(Universitas Gadjah Mada)

Dr. Wigati Yektiningtyas, M.Hum.

(Universitas Cendrawasih, Jayapura)

Editor:

Dr. Wiyatmi, M.Hum.

Dwi Budiyanto, M.Hum.

Kusmarwanti, M.Pd., M.A.

Sastra: Merajut Keberagaman, Mengukuhkan Kebangsaan

© Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., Manneke Budiman, Ph.D., dll.

Editor:

Dr. Wiyatmi, M.Hum., Dwi Budiyanto, M.Hum.,
Kusmarwanti, M.Pd., M.A.

Diterbitkan oleh:

Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI)
Komisariat Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo No. 1, Karangmalang, Yogyakarta

Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Sastra: Merajut Keberagaman, Mengukuhkan Kebangsaan/ Sutrisna
Wibawa, Manneke Budiman, dll.
Yogyakarta: 2017

vi + 1126 halaman, 15 x 23 cm
ISBN: 978-602-61439-1-4

Isi keseluruhan buku ini bukan tanggung jawab
editor, panitia penyelenggara HISKI dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Sejak awal kelahirannya bangsa Indonesia terbentuk dari beragam suku bangsa, golongan, agama dan kepercayaan yang bermukim di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kondisi tersebut disadari benar oleh para pendiri negara dan diekspresikan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun, dalam perjalannya, kita sering melupakan keadaan tersebut. Akibatnya, berbagai konflik antarsuku, antaragama dan kepercayaan, bahkan antargolongan terjadi di sana sini. Kalau tidak segera diselesaikan konflik tersebut berpotensi melahirkan disharmonisasi antarsesama, bahkan dapat mengancam keutuhan NKRI. Menjalani kehidupan dengan damai, merdeka, dan bahagia tentu merupakan hal yang diinginkan semua orang. Agar hal tersebut dapat kita nikmati, maka kita juga ikut bertanggung jawab untuk menjaga harmonisasi dan keutuhan bersama.

Sastra merupakan salah satu produk budaya yang senantiasa ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak awal 1920-an sastra Indonesia telah ikut ambil bagian sebagai media yang menggambarkan perjuangan generasi muda Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan feodalisme (*Student Hijo, Sitti Nurbaya, Salah Asuhan, Manusia Bebas, dan Layar Terkembang*). Perjuangan melawan kolonialisme dan feodalisme dalam sejumlah karya tersebut, tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang dari etnik dan golongan tertentu, tetapi juga lintas etnik dan golongan. Dari karya-karya tersebut, kita juga dapat membaca bahwa eksistensi manusia bukan semata-mata dilihat dari asal usul etnik atau pun golongan, bahkan kelas dan gendernya, tetapi lebih pada bagaimana manusia tersebut saling menghargai antarsesama, berjuang dan bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik dan harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dalam rangka ikut berperan serta untuk menjaga dan menghargai keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itulah, maka Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat Universitas Negeri Yogyakarta menginisiasi sebuah Seminar bertema “Sastra, Merajut Keberagaman, Mengukuhkan

Kebangsaan,” yang diselenggarakan pada 20 Mei 2017. Pada seminar tersebut dipresentasikan dan didiskusikan hasil-hasil penelitian dari para peneliti dan dosen dari berbagai universitas dan lembaga penelitian di seluruh Indonesia yang terbagai dalam subtema, (1) Pembelajaran Sastra untuk Menjaga Harmonisasi Bangsa, (2) Sastra sebagai Media Penebar Nilai Keberagaman, (3) Sastra dan Identitas Kebangsaan, (4) Globalitas dan Lokalitas dalam Sastra, (5) Sastra dan Konstruksi Gender, (6) Sastra dan Multikulturalisme, dan (7) Sastra dan Keberagaman. Sebagai pemakalah utama diundang empat pakar nasional dari Yogyakarta (Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. dan Dr. Wening Udasmoro), Jakarta (Manneke Budiman, Ph.D.), dan Jayapura (Dr. Wigati Yektiningtyas, M.Hum.). Selain itu, juga ditampilkan sekitar seratus pemakalah pendamping dari berbagai universitas dan lembaga di Indonesia.

Melalui seminar ini diharapkan dapat didiskusikan berbagai persoalan bangsa yang diekspresikan melalui berbagai fenomena sastra, yang muaranya diharapkan dapat saling menghargai keberagaman untuk makin mengukuhkan kesadaran kebangsaan kita. Akhirnya, selamat membaca, berdiskusi, dan menyimak sejumlah gagasan yang tertuang dalam makalah yang terhimpun dalam prosiding ini.

Yogyakarta, 20 Mei 2017
Tim Editor

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEMBELAJARAN SASTRA UNTUK MENJAGA HARMONI BANGSA	
PEMBELAJARAN KRITIS DEKONSTRUKSI DERRIDA, PEMAHAMAN TEKS PEDAGOGI KRITIS A.M. Susilo Pradoko	2
PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA PEMBELAJARAN BIPA (BAHASA INDONESIA UNTUK PENUTUR ASING) BERBANTUAN MEDIA GAMELAN MADURA STUDI KASUS PEMBELAJARAN BIPA DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA Ahmad Jami'ul Amil	14
AJARAN PANCADHARMA LAKON WISUDHA SATRIATAMA DALAM INSTITUSI PUBLIK (SUATU STUDI TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH DI KABUPATEN JEMBER) Asri Sundari	21
MENULIS KREATIF PUISI DENGAN MEDIA BATIK MELALUI METODE CTL SEBAGAI WUJUD KEBERAGAMAN BUDAYA BANGSA Endang Sulistijani, Arinah Fransori dan Friza Youlinda ..	42
PEMBELAJARAN WANGSALAN DALAM SASTRA JAWA UNTUK MENDUKUNG HARMONI KEBANGSAAN Sri Harti Widyastuti	57

PEMBELAJARAN SASTRA DENGAN PENDEKATAN <i>CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL)</i> UNTUK MENGUKUHKAN KEHARMONISAN BANGSA Sulistyaningtyas	80
PEDEKATAN <i>GENRE-BASED</i> DALAM NOVEL SUNDA (KESERAGAMAN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA) Temmy Widyastuti, Yatun Romdonah Awaliah, dan Haris Santosa Nugraha	91
<i>SERAT HARDAMUDHA</i> SEBUAH SASTRA DIDAKTIS DALAM SASTRA JAWA Kamidjan	101
SASTRA MEDIA PENEBAR KERAGAMAN	
REPRODUKSI DAN KONSUMSI BUDAYA DALAM KOMUNITAS LITERASI DI SURAKARTA 2000-2015 Dwi Susanto	125
STRATEGI NARASI DALAM MEMBENTUK KESADARAN ATAS KEBERAGAMAN: ANALISA PERBANDINGAN BUKU CERITA ANAK DARI INDONESIA, AMERIKA DAN JEPANG Shuri Mariasih Gietty Tambunan	143
MERAIH HIPERSASTRA LEWAT MUTILASI SASTRA Suwardi Endraswara	164
MEMBACA SASTRA: ALTERNATIF BACAAN PEMBENTUK KARAKTER ANAK BANGSA Nurweni Saptawuryandari	183
SASTRA DAN IDENTITAS KEBANGSAAN	
DISKRIMINASI SOSIAL DALAM ANTOLOGI PUISI ESAI <i>ATAS NAMA CINTA</i> KARYA DENNY JA Aji Septiaji	198
NATIONAL BUILDING DAN KARYA SASTRA INDONESIA Awia Akbar Ilma	213

CITRA BUMIPUTRA MELAYU BORNEO MENURUT PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA DALAM TEKS SYAIR PERANG WANGKANG Bagus Kurniawan	226
SASTRA BIOGRAFI DAN FILM BIOPIK: ADAPTASI KARYA KREATIF HISTRIOGRAFI BIOGRAFI INDONESIA ANTARA KEPENTINGAN IDENTITAS KEBANGSAAN DAN FETISIME KOMODITAS (KAJIAN ATAS <i>PENAKLUK BADAI NOVEL BIOGRAFI K.H. HASYIM ASY'ARI</i> DAN FILM <i>SANG KIAI</i>) Bambang Aris Kartika	243
WARNA LOKAL JAWA DALAM NOVEL TRILOGI <i>RONGGENG DUKUH PARUK</i> KARYA AHMAD TOHARI Hartono	273
MELAWAN TRADISI: PEMBERONTAKAN PRAMOEDYA ANANTA TOER TERHADAP TRADISI PRIYAYI JAWA DAN KEKUASAAN KOLONIAL DALAM NOVEL <i>BUMI MANUSIA</i> IG. Krisnadi	296
GLOBAL DAN LOKAL DALAM DRAMA-DRAMA BERTOLT BRECHT DI INDONESIA Isti Haryati	323
SYAIR LAGU BANYUWANGEN: HIBRIDITAS DAN GELIAT IDENTITAS Novi Anoegrajekti	340
KEHIDUPAN SOSIAL-BUDAYA PENYAIR DAN KARYA SASTRA YANG DILAHIRKANNYA MEWARNAI KEBERAGAMAN PEMIKIRAN KEBANGSAAN Ekarini Saraswati	351

SENI PERTUNJUKAN CERITA SI PITUNG: PERTARUNGAN IDENTITAS DAN REPRESENTASI MASYARAKAT BETAWI Siti Gomo Attas	366
GLOBALISASI DAN LOKALITAS DALAM SASTRA	
TRADISI BASANAN DAN MANTRA SANTET OSING SEBAGAI WUJUD KEARIFAN LOKAL DALAM MEREDAM KONFLIK (TINJAUAN SOSIOSEMANTIK: STUDI KASUS DI BANYUWANGI) Asrumi	384
MENGENAL IDENTITAS MASYARAKAT BUTON MELALUI KONSEP BERKELUARGA DALAM KABANTHI KALUKU PANDA Kosilah	435
STRUKTUR DAN RELASI KELUARGA DALAM BUDAYA LOKAL PADA CERITA BERSAMBUNG PEMENANG SAYEMBARA MENULIS MAJALAH <i>FEMINA</i> TAHUN 2012-2013 Kusmarwanti	455
MUNCULNYA FILOSOFI “ <i>BANYAK ANAK BANYAK RIZKI</i> ” PADA MASYARAKAT JAWA MASA <i>CULTUURSTELSEL</i> Latifatul Izzah	470
PERPADUAN UNSUR MODERN DAN TRADISI DALAM SASTRA PAKELIRAN KI WARSENEN SLENK Purwadi	487
MISTERI ALAM “SUWUNG” SATU ASPEK SUFISTIK DALAM TEKS LAMA NUSANTARA (STUDI KASUS BALUNGAN LAKON DAN PAGELARAN WAYANG PURWA) S. Bambang Purnomo	500

SASTRA INDONESIA DALAM TEGANGAN LOKAL- GLOBAL Taufik Darmawan	524
GLOBALITAS DAN LOKALITAS DALAM NOVEL-NOVEL KARYA NH DINI Pipit Mugi Handayani	539
SASTRA DAN KONSTRUKSI GENDER	
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP HOMOSEKSUAL DALAM NOVEL <i>RUMAH KEPOMPONGKARYA I WAYAN ARTIKA</i> (SUATU TINJAUAN <i>QUEER THEORY</i>) Alfian Rokhmansyah	557
SEKSUALITAS PEREMPUAN DALAM SAJAK-SAJAK KARYA GOENAWAN MOHAMAD Baban Banita dan Nana Suryana	571
REFLEKSI NILAI-NILAI KEHIDUPAN DALAM NOVEL SRI RINJANI: SEBUAH CERMINAN EMANSIPASI WANITA Baiq Desi Milandari, Ahyati Kurniamala Niswariyana	589
PEREMPUAN-PEREMPUAN DI SIMPANGJALAN : PERGULATAN ANTARA INFERIORITAS DAN SUPERIORITAS DALAM-DRAMA MELAYUTIONGHOA Cahyaningrum Dewojati	609
PERAN KARYA SASTRA DALAM MENGUNGKAP FENOMENA LGBT Dian Swandayani dan N. Nastiti Utami	632
REFLEKSI KONSTRUKSI GENDER DALAM SYAIR LAGU CAMPURSARI Sri Sulistiani	651

KONSTRUKSI PEREMPUAN KARIER DALAM NOVEL <i>CRITICAL ELEVEN</i> KARYA IKA NATASSA Evara Nida Maulida	678
WANITA SEBAGAI BANGSA Muh. Arif Rokhman	699
PEREMPUAN, WACANA SOSIAL, DAN SEKS DALAM NOVEL <i>BURUNG-BURUNG RANTAU</i> KARYA Y.B. MANGUNWIJAYA DAN <i>TARIAN BUMI</i> KARYA OKA RUSMINI Nana Suryana dan Baban Banita	711
BIAS GENDER DALAM DONGENG: ANALISIS NARATIF TERHADAP CERITA RAKYAT “BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH” Ninawati Syahrul	729
EKSISTENSI TOKOH TEYI DALAM NOVEL <i>KERAJAAN RAMINEM</i> KARYA SUPARTO BRATA SEBAGAI REPRESENTASI PEMBEBASAN ATAS DOMINASI PATRIARKAT Novi Sri Purwaningsih	747
MENGUNGAT KEKUASAAN PATRIARKI DALAM NOVEL <i>BUMI MANUSIA</i> KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER Renny Intan Kartika	758
FASHION DAN PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM <i>THE DEVIL WEARS PRADA</i> KARYA LAUREN WEISBERGER Uccy Elly Kholidah	772
FIKSI EKO-FEMINIS DI TENGAH KUASA KAPITALISME PATRIARKI, MEMBACA <i>PARTIKEL</i> KARYA DEE Wiyatmi	790

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM CERITA RAKYAT JAWA TIMUR Sri Wahyu Widayati	807
SASTRA DAN KEBERAGAMAN	
RELASI ANTAR BUDAYA DALAM NOVEL <i>KEMBAR KEEMPAT</i> KARYA SEKAR AYU ASMARA: PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME Bakti Sutopo	827
KEBERAGAMAN SUKU BANGSA DALAM TOKOH SERIAL <i>UPIN IPIN</i> Di'amah Fitriyyah	847
SASTRA PROFETIK DAN ISU KEAGAMAAN DI INDONESIA Faisal Isnan	863
KESADARAN KEBERAGAMAN DALAM SASTRA SAMAWA Juanda	879
DISHARMONI SOSIAL DALAM KARYA FIKSI LGBT AMERIKA EDMUND WHITE:TELAAH KORELASI SASTRA DAN HARMONI BANGSA Lestari Manggong	894
KONSTRUKSIMASYARAKAT MELAYU-TIONGHOA DI INDONESIA DALAM SASTRA DRAMA AWAL ABAD KE-20: SEBUAH PEMBACAAN <i>NEW HISTORICISM</i> Lina Meilinawati Rahayu dan Aquarini Priyatna	912
ASPEK MULTIKULTURAL DALAM CERITA RAKYAT NUSANTARA: ALTERNATIF MEDIA PENDIDIKAN BERBASIS SASTRA Novi Siti Kussuji Indrastuti	932

REKONSTRUKSI PERALIHAN KEKUASAAN SYIWA- BUDDHA KE ISLAM DALAM NOVEL <i>SABDA PALON</i> KARYA DAMAR SHASHANGKA Nurhadi	950
TRAGEDI DAN KOMEDI SEBAGAI STRATEGI KULTURAL MENGHADAPI KRISIS KEBERAGAMAN DALAM BEBERAPA CERITA PENDEK KARYA AGUS NOOR DAN INDRA TRANGGONO Paulus Heru Wibowo Kurniawan	972
MULTIKULTURALISME SASTRA INDONESIA DALAM MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA Puji Santosa	995
NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM TEKS DRAMA <i>JAKARTA KARIKATUR</i> KARYA YUSTIANSYAH LESMANA (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA) Rahmi Septiari, Ira Rachmayanti Sukanda	1021
HEGEMONI BARAT DAN RESISTENSI TIMUR DALAM NOVEL <i>CANTIK ITU LUKA</i> KARYA EKA KURNIAWAN DAN NOVEL <i>RUMAH KACA</i> KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER KAJIAN POSTKOLONIALISME SASTRA Yolandhika Rizkita Kurniawan	1038
IRONICAL WORD PLAY: REVEALING THE WEST'S HYPOCRISY IN DAVID ROBERTS' "A MESSAGE FROM TONY BLAIR TO THE PEOPLE OF IRAQ" Sugi Iswalono	1058
MERAJUT KEBERAGAMAN DALAM KEBERAGAMAN, MEMBACA NOVEL MARYAM KARYA OKKY MADASARI Varatisha Anjani Abdullah	1080
BAHASA DAN ASPEK BUDAYA DALAM NASKAH LAYANG MURSADA Suwarni	1095

FILOSOFI RELIGIUS DALAM SASTRA LISAN DI DESA BEJIHARJO: BINGKAI HARMONI KERUKUNAN BERAGAMA DI MASYARAKAT GUNUNGKIDUL Mei Latipah, Dyah Ayu Putri U., Haryanto, Dyah Kemala F., dan Ari Kusmiatun	1110
HUBUNGAN CINA-JAWA MENJELANG PERANG JAWA (1825-1830) DALAM NOVEL PANGERAN DIPONEGORO KARYA REMY SYLADO Dwi Budiyanto	1127
LOKALITAS CERPEN INDONESIA SEBAGAI WACANA POLITIS Else Liliani	1142

LAMPIRAN-LAMPIRAN
 NOTULENSI SEMINAR

Pembelajaran
Sastra

untuk Menjaga
**HARMONI
BANGSA**

MUNCULNYA FILOSOFI “BANYAK ANAK BANYAK RIZKI” PADA MASYARAKAT JAWA MASA CULTUURSTELSEL

Latifatul Izzah

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember

Email: latifatul.izzah@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang awal munculnya filosofi “*Banyak Anak Banyak Rizki*” pada masyarakat Jawa masa *cultuurstelsel* antara Tahun 1830-1870. Kajian ini menjadi unik dan menarik karena kebijakan *cultuurstelsel* yang diterapkan oleh pemerintah colonial Belanda pada masyarakat petani di wilayah Jawa khususnya Karesidenan Madiun berdampak pada tingginya angka demografis. Tingginya angka demografis ternyata disengaja untuk memenuhi banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan pada tanaman *agroindustri* khususnya tebu dan kopi yang diwajibkan pada para petani. Kondisi ini mengakibatkan munculnya filosofi “*Banyak Anak Banyak Rizki*” pada masyarakat petani. Petani menginginkan beban pajak yang dibebankan padanya berupa tenaga kerja dapat dibagi dengan mempunyai banyak anak. Penelitian ini dibedah dengan *teori dari Ben White* dan menggunakan *metode historis*. *Metode historis* digunakan untuk menelusuri awal mula munculnya pandangan masyarakat Jawa tentang filosofi “*Banyak Anak Banyak Rizki*”. Sementara *teori dari Ben White* digunakan untuk melacak relevansi antara kebijakan *cultuurstelsel* pemerintah colonial Belanda dengan tingginya angka demografis yang sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja pada tanaman *agroindustri*. Penelitian ini didasarkan atas dua kelompok data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari manuskrip-manuskrip yang sejaman dengan masa *cultuurstelsel*, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai tempat dan meliputi karya-karya

terpublikasi, hasil penelitian, dan laporan-laporan pemerintah terkait dengan permasalahan yang diteliti. Populasi yang dijadikan fokus adalah masyarakat petani di Karesidenan Madiun.

Kata Kunci : Filosofi banyak anak banyak rizki, Masyarakat Jawa, Masa *cultuurstelsel*

A.Pendahuluan

Perang Diponegoro yang berakhir pada bulan Maret 1830 dengan penangkapan Pangeran Diponegoro selagi masih berunding dengan Belanda, membawa kerusakan lingkungan dan kemerosotan ekonomi yang sangat parah. Perang ini menelan korban 200.000 orang meninggal dunia dan pemerintah Belanda menanggung hutang f 32.000.000 (M.C. Ricklefs, 1981: 113). Upaya yang dilakukan Belanda untuk merehabilitasi perekonomiannya dan membayar hutang yang sudah membengkak, pemerintah harus menentukan pilihan sistem terbaik untuk meraih keuntungan secepat mungkin. Bagi *van den Bosch*, Hindia Belanda adalah sebuah *wingewest* yang harus mendatangkan keuntungan.

Pada Tahun 1830, kebijakan politik Kolonial Belanda di wilayah Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa. Kondisi ini muncul sebagai akibat dari membengkaknya hutang yang besar akibat Perang Diponegoro dan untuk merehabilitasi perekonomian Negeri Belanda. Pernyataan ini dikemukakan oleh *J van den Bosch*. Kesulitan perekonomian yang dialami Negeri Belanda karena lepasnya Belgia pada Tahun 1830. Belgia merupakan kawasan industri yang kaya bagi Belanda (I.J. Brugman, 1983: 76-77). Pilihan sistem semi liberal yang dilaksanakan sejak Tahun 1811-1829 ternyata kurang dapat memaksimalkan produksi tanaman ekspor, baik oleh petani maupun pengusaha Eropa. Konsep *van den Bosch* tentang sistem *cultuurstelsel* akhirnya diterima sebagai pilihan paling tepat untuk kondisi Pulau Jawa pada waktu itu.

Sistem *cultuurstelsel* pada dasarnya adalah sistem monopoli VOC yang disempurnakan. Menurut *van den Bosch*, dengan sistem bebas, petani segan menanam tanaman ekspor yang menjadi bahan perdagangan utama untuk mengisi kas pemerintah Belanda. Tanaman ini (kopi dan tarum) justru sangat berhasil dengan sistem paksa seperti di daerah *Priangan* karena menggunakan kekuasaan kepala pribumi. Cara yang ditempuh adalah, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor pengganti pajak. Pelaksanaannya dipimpin dan diawasi oleh *pejabat Eropa (residen)* tetapi tetap menggunakan kekuasaan *kepala pribumi (bupati)* yang memerintah seperti sediakala. Petani tetap bekerja dalam komunitas desa dibawah kepala desa.

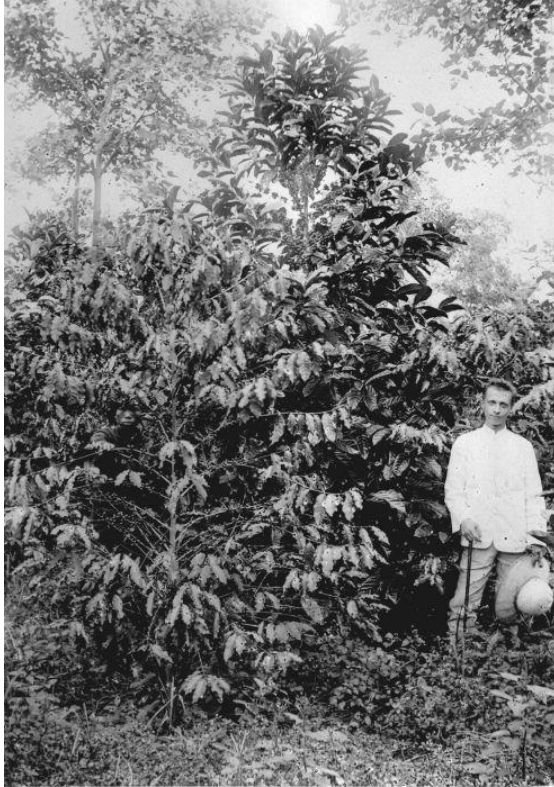
Dari gambaran di atas jelas bahwa sistem *cultuurstelsel* memanfaatkan ikatan tradisional antara para kepala pribumi, kepala desa, dan warga desa. Pemerintah Belanda kembali pada sistem feodal lama, yaitu menguasai tanah dan cacah (rumah tangga petani) secara langsung. Bahkan pemerintah kembali menarik pajak *in natura* dalam bentuk tanaman ekspor yang dilaksanakan dengan kerja wajib. Selain tanah, tenaga kerja dan modal rakyat (peralatan hewan bajak dan hewan angkutan), pemerintah memasukkan unsure-unsur baru seperti organisasi produksi, modal, teknologi Barat (pabrik-pabrik) dan pengusaha swasta (C. Fasseur, 1975: 17). Dengan perpaduan unsur-unsur tersebut dan terjalin dalam ikatan kekuasaan feodalistik, maka rakyat akan patuh dan produksi akan berlimpah.

Selanjutnya pelaksanaan *sistem cultuurstelsel* yang diadakan di seluruh Jawa memerlukan dukungan berbagai prasarana dan sarana yang memadai (seperti memperbaiki berbagai jalan, jembatan dan membangun jalan baru). Pemerintah juga harus mengusahakan armada angkutan hasil produksi sampai ke pelabuhan. Bangunan-bangunan lain untuk kepentingan *cultuurstelsel* perlu lebih banyak dibangun oleh pemerintah beserta pemeliharaan dan penjagaannya. Seluruh pekerjaan tersebut merupakan beban rakyat desa yang dilaksanakan dengan kerja wajib umum. Kebijakan *sistem*

cultuurstelsel dalam kajian ini difokuskan pada wilayah Karesidenan Madiun yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan *sistem cultuurstelsel*. Berikut foto mengenai tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan di perkebunan kopi, dan foto tenaga kerja di perkebunan tebu pada masa *cultuurstelsel*.



Pekerja pribumi pada perkebunan kopi dan perkebunan tebu pada masa *cultuurstelsel*



Pegawai Belanda berdiri di sebelah tanaman kopi pada masa *cultuurstelsel*

B. Landasan Teori

Penelitian yang berjudul “ ***Munculnya Filosofi “Banyak Anak Banyak Rizki” Pada Masyarakat Jawa Masa Cultuurstelsel***” ini dibedah dengan teori dari Ben White dan menggunakan metode historis.

Mengenai pertumbuhan penduduk, Ben White berpendapat bahwa tuntutan tenaga kerja pada masa *cultuurstelsel* justru meningkatkan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan analisis permintaan tenaga kerja, White menilai pertumbuhan penduduk Jawa sebagai reaksi positif dari petani dalam menanggapi tuntutan kerja wajib pemerintah colonial.

Disatu pihak satuan dasar perilaku ekonomi petani adalah keluarga, sedang dipihak lain satuan dasar dari perilaku kependudukan petani adalah juga keluarga. Oleh karena itu satuan produksi dan reproduksi adalah sama. Dalam situasi demikian, dorongan untuk mempunyai banyak anak adalah besar, sebab keluarga adalah sumber tenaga kerja untuk produksi petani maupun untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib. White melihat nilai ekonomis yang sangat penting dengan memiliki banyak anak, karena anak sudah dapat mencari nafkah sedangkan konsumsi anak lebih sedikit daripada konsumsi orang dewasa. Sikap petani ini merupakan salah satu factor pendorong pertumbuhan penduduk.

Menurut Ben White ada 3 variabel yang mempengaruhi perkembangan penduduk (Ben White: 1973, 217-236), antara lain: 1) komunalisasi sawah, 2) komersialisasi, 3) tenaga kerja wanita. Pertama, adanya tanah *lanyah* yang dibagikan pada para petani mempermudah terjadinya perkembangan penduduk. Para *numpang* langsung mendapat tanah garapan, *kuli setengah kenceng* juga mendapat tanah garapan tanpa menunggu giliran. Dengan kata lain seluruh petani tidak lagi perlu memikirkan bagaimana caranya membagi *warisan dan tanah* diantara anak-anaknya yang terlalu banyak. Mereka menyadari bahwa kerabat yang besar dapat menolong memikul beban pajak tanah.

Kedua, perubahan *sistem apanage* kesistem *agroindustri* memerlukan intensifikasi tata guna tanah untuk memperoleh keuntungan maksimal sebagai reaksi terhadap permintaan pasar (R.J. Holton, 1985: 64-99). Secara otomatis diperlukan tenaga kerja yang banyak, baik dalam proses *agroindustri* maupun *infrastrukturnya* (pembangunan jalan, jembatan, pabrik dan lain-lain).

Ketiga, adanya tenaga kerja wanita di perkebunan-perkebunan kopi mengakibatkan berhentinya proses menyusui pada anak-anak yang ditinggalkannya. Secara biologis berhentinya proses menyusui mengakibatkan tingkat kehamilan tinggi. Para petani berpendapat, dengan banyak anak dapat membantu mencari nafkah.

Rancangan (Desain) Penelitian

Artikel yang berjudul “ *Munculnya Filosofi “Banyak Anak Banyak Rizki” Pada Masyarakat Jawa Masa Cultuurstelsel*” ini adalah penelitian sejarah maka rancangan penelitian yang akan digunakan adalah rancangan penelitian menurut *metode sejarah*. Dalam metode penelitian sejarah maka tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan meliputi, penentuan topik (obyek Penelitian), heuristik (pencarian sumber/pengumpulan data penelitian), kritik sumber (verifikasi data), seleksi dan kategorisasi, analisis data, dan penulisan sejarah (historiografi).

C. Madiun Menjelang Cultuurstelsel

Madiun sebelum menjadi kekuasaan Belanda merupakan bagian dari *Vorstenlanden*. Kondisi social budaya yang berlaku di Karesidenan Madiun tidak terlepas dari Kerajaan Mataram. Baru pada Tahun 1830 Karesidenan Madiun berhasil dikuasai oleh Belanda, akibatnya Karesidenan Madiun mengalami perubahan-perubahan baik di bidang politik maupun social ekonomi.

Berdasarkan Perjanjian Giyanti Tahun 1755, wilayah Mataram dibagi menjadi dua bagian antara Paku Buwana II dengan Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi raja Mataram di Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengku Buwana I. Dalam perjanjian tersebut, wilayah yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi adalah daerah pedalaman kerajaan Jawa yaitu daerah *mancanegara timur*, sedangkan wilayah *mancanegara barat* diberikan kepada Sunan.

Daerah *mancanegara timur* yang menjadi wilayah Sultan adalah *Madiun, Magetan, Caruban, Kertasana, Kalangbret, Rawa, Japan, Jipang, Teraskaras, Sela, Warung, Wirasari, Grobogan dan sebagian besar Pacitan* (G.P. Rouffer, 1931: 176). Dalam perkembangannya daerah *Madiun, Magetan, Caruban dan Pacitan* menjadi bagian dari Kasunanan Surakarta. Pada Tahun 1830 dengan berakhirnya Perang Diponegoro, daerah *mancanegara* tersebut menjadi

milik Belanda, sebagai konsekuensi atas bantuan Belanda dalam meredam pemberontakan Diponegoro.

D. Komunalisasi Sawah

Ketika Karesidenan Madiun jatuh ketangan Belanda, konsep kepemilikan raja masih dipertahankan oleh Belanda. Belanda menganggap bahwa tanah-tanah yang ada merupakan miliknya. Kebijakan-kebijakan baru mulai diterapkan. Semua tanah *lungguh* di Karesidenan Madiun menjadi milik *gubernemen*. Para priyayi pemilik *lungguh* diganti dengan gaji bulanan (Latifatul Izzah, 2001: 84). Selain tanah, pemerintah Belanda juga butuh tenaga kerja. Cara terbaik untuk memperoleh buruh ialah lewat pajak tanah. Pajak tanah ditukar dengan kerja bakti, sementara kerja bakti itu dibebankan kepada desa dan bukan kepada pribadi pemilik tanah (Arsip Nasional, Map No.6). Petani pemilik tanah tidak diharuskan membayar pajak tanah, karena telah diperhitungkan terhadap upah yang akan diterima seandainya ia bekerja di perkebunan-perkebunan dan proyek-proyek lain. Singkatnya buruh tani tidak dibayar dan tidak diwajibkan membayar pajak tanah. Dari itu kerja bakti menjadi identik dengan pajak tanah (*Eindresume*, vol. III, Bijlage J., 143).

Seperti yang dikatakan oleh Ben White bahwa untuk merangsang pertumbuhan penduduk guna memenuhi tenaga kerja untuk tanaman agroindustri pada masa *cultuurstelsel*, maka harus ada kebijakan yang berupa komunalisasi sawah. Komunalisasi sawah yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya tanah *lanyah* yang dibagikan pada para petani untuk mempermudah terjadinya perkembangan penduduk. Para *numpang* langsung mendapat tanah garapan, *kuli setengah kenceng* juga mendapat tanah garapan tanpa menunggu giliran. Dengan kata lain seluruh petani tidak lagi perlu memikirkan bagaimana caranya membagi *warisan dan tanah* diantara anak-anaknya yang terlalu banyak. Mereka menyadari bahwa kerabat yang besar dapat menolong memikul beban pajak tanah.

Pajak tanah hanya dipikul oleh mereka yang mempunyai tanah. Untuk memperoleh jumlah buruh yang diperlukan, petani dalam jumlah yang sama harus dijadikan petani penguasa tanah. Hanya mereka yang mempunyai hak atas tanahlah yang diwajibkan untuk kerja bakti. Untuk merealisasikan konsep tersebut, selain *tanah lungguh* yang wajib diserahkan, *tanah lanyah* harus dibagi rata tanpa menunggu proses penggiliran. Berbarengan dengan proses pengalihan dari hak milik perorangan menjadi hak milik desa, mulai terbentuklah corak desa masa kini seperti yang kita kenal sekarang. Kantung-kantung terdiri dari habitat manusia di bawah pohon buah-buahan dikelilingi sawah-sawah. Perumahan yang tadinya tercerai berai tampaknya semakin mengumpul menjadi satu membentuk lingkungan desa yang besar (Onghokham, 1984: 20). Dengan dinyatakannya tanah milik desa, maka pajak atau kerja bakti dibebankan kepada desa, lembaga ini kini dapat memperbesar jumlah petaninya lewat pembagian tanah sesuai dengan kebutuhan akan buruh sebagai yang dituntut oleh *cultuurstelsel* (*Eindresume*, vol. II, hlm. 200).

Tanah-tanah lanyah dan tanah lungguh seluas 55,15 mil (Dihitung dari *Eindresume* I, Lampiran A) merupakan tanah-tanah yang subur dan mempunyai pengairan yang bagus. Tanah-tanah ini terdapat di 17 distrik antara lain: *Madiun, Maospati, Goranggareng, Purwodadi dan Ponorogo*. Tanah-tanah ini pada masa *cultuurstelsel* dibagi rata pada para petani. Para petani akhirnya hanya memperoleh penguasaan atas bidang-bidang tanah yang sangat kecil yang ukurannya bahkan kurang dari seperempat acre (kurang lebih 0,5 ha). Tanah-tanah yang ada di dataran tinggi seperti terdapat di wilayah *Uteran, Kanigoro, Magetan, Balepanjang, Bulu, Jogorogo, sineh, Pulung, Arjowinangun, Sumoroto, Jebeng, Parang, Pacitan, Semanten, lorok dan Panggul* tidak terjadi komunalisasi. Hal ini disebabkan tanah –tanah yang ditanami kopi baik di hutan (*bosch koffi*) maupun di kebun-kebun desa (*tuin koffi*) merupakan milik komunal desa, sehingga tidak perlu dibagikan kepada penduduk. Para petani bekerja

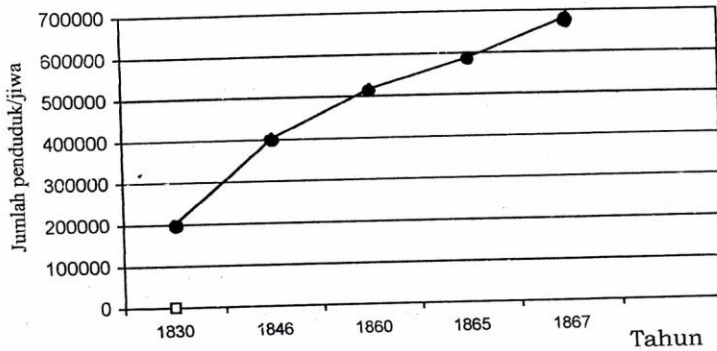
bersama-sama atas perintah *gubernuran* untuk menanam kopi, memelihara dan menuainya.

E. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk

Menurut Ben White ada 3 variabel yang mempengaruhi perkembangan penduduk (Ben White: 1973, 217-236), antara lain: 1) komunalisasi sawah, 2) komersialisasi, 3) tenaga kerja wanita. Pada Tahun 1831 penduduk di wilayah Karesidenan Madiun diperkirakan ada 200.000 jiwa (Onghokham, 1984: 3). Padahal Belanda membutuhkan tenaga yang banyak untuk kepentingan tanaman *agroindustri*. Untuk merangsang jumlah pertumbuhan penduduk demi mencukupi kebutuhan buruh, *tanah lanyah* yang ada di Karesidenan Madiun dibagikan pada para petani tanpa memandang *petani numpang* atau *kuli setengah kenceng*. Para petani yang mendapat tanah diwajibkan membayar pajak berupa kerja bakti. Pajak tersebut sangat memberatkan para petani, sehingga para petani cenderung menginginkan jumlah keluarga yang besar untuk membantu meringankan pajak yang berupa kerja bakti. Tenaga kerja laki-laki sangat dibutuhkan di perkebunan-perkebunan *gubernemen*, begitu juga tenaga kerja wanita dan anak-anak. Mereka dibutuhkan tenaganya khususnya di perkebunan kopi. Kondisi ini mempermudah terjadinya proses kehamilan kembali, karena pendeknya menyusui.

Upaya Belanda untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan cara merangsang pertumbuhan penduduk ternyata berhasil. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk pada Tahun 1846 bertambah menjadi 403.483 jiwa; pada Tahun 1860 sebesar 517.713 jiwa; pada Tahun 1865 sebesar 587.454 dan pada Tahun 1867 sebesar 683.306 (Kolonial verslag, 1877: 181). Lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik 1.

Grafik I
 Pertumbuhan Penduduk di Karesidenan Madiun
 Tahun 1830-1867

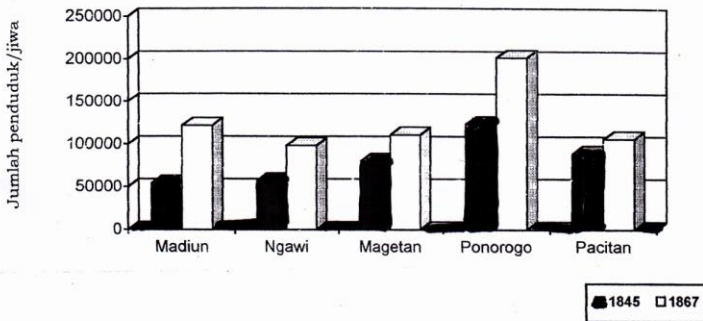


Sumber: *Kolonial Verslag*, 1877, hlm. 181.

Perkembangan jumlah penduduk di Karesidenan Madiun dapat dilihat perkabupaten, antara lain: *Kabupaten Madiun* pada Tahun 1845 berjumlah 53.974 jiwa menjadi 121.531 jiwa pada Tahun 1867; *Kabupaten Ngawi* pada Tahun 1845 berjumlah 56.856 jiwa menjadi 98.426 jiwa pada Tahun 1867; *Kabupaten Magetan* pada Tahun 1845 berjumlah 79.955 jiwa menjadi 110.615 jiwa pada Tahun 1867; *Kabupaten Ponorogo* pada Tahun 1845 berjumlah 123.484 jiwa menjadi 201.615 jiwa pada Tahun 1867; *Kabupaten Pacitan* pada Tahun 1845 berjumlah 84.207 jiwa menjadi 106.117 jiwa pada Tahun 1867. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik II.

Grafik II

Pertumbuhan Penduduk Perkabupaten di Karesidenan Madiun
Tahun 1845-1867



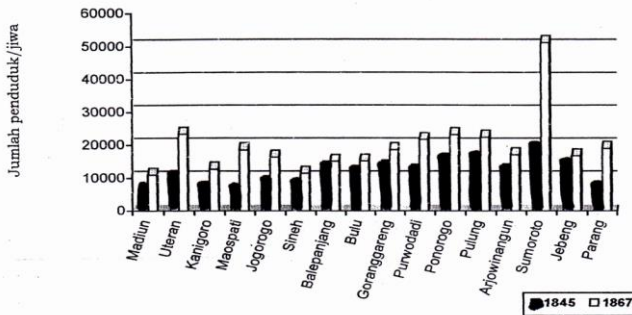
Sumber: Dihitung dari *Eindresume*, 1, lampiran A, lihat juga P. Bleeker, *Nieuwe Bijdragen tot de Kennis der Bevolking Stsistiek van Java* KITLV Nederlandsche Indie's Gravenhage: M. Nijhoff, 1870), hlm. 133-137.

Distrik-distrik yang menjadi pusat penanaman *agroindustri* mengalami lonjakan jumlah penduduk. *Distrik Madiun* pada Tahun 1845 berjumlah 6.402 jiwa mengalami kenaikan menjadi menjadi 10.912 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Uteran* Tahun 1845 berjumlah 10.232 jiwa menjadi 22.356 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Kanigoro* pada Tahun 1845 berjumlah 6.824 jiwa menjadi 12.739 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Maospati* pada Tahun 1845 berjumlah 5609 jiwa menjadi 18.565 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Jogorogo* pada Tahun 1845 berjumlah 8.043 jiwa menjadi 16.302 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Sineh* pada Tahun 1845 berjumlah 7.252 jiwa menjadi 11.468 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Balepanjang* pada Tahun 1845 berjumlah 12.952 jiwa menjadi 15.060 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Bulu* pada Tahun 1845 berjumlah 11.658 jiwa menjadi 15.187 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Goranggareng* pada Tahun 1845 berjumlah 13.290 jiwa menjadi 18.582 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Purwodadi* pada

Tahun 1845 berjumlah 12.064 jiwa menjadi 21.730 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Ponorogo* pada Tahun 1845 berjumlah 15.395 jiwa menjadi 23.192 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Pulung* pada Tahun 1845 berjumlah 15.677 jiwa menjadi 22.455 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Arjowinangun* pada Tahun 1845 berjumlah 12.142 jiwa menjadi 17.090 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Sumoroto* pada Tahun 1845 berjumlah 19.497 jiwa menjadi 51.191 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Jebeng* pada Tahun 1845 berjumlah 13.212 jiwa menjadi 16.748 jiwa pada Tahun 1867. *Distrik Parang* pada Tahun 1845 berjumlah 5.677 jiwa menjadi 18.978 jiwa pada Tahun 1867 (P. Bleeker, 1870: 141-142). Untuk lebih jelasnya lihat grafik III.

Grafik III

Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Wilayah Agro-industri (tebu dan kopi) Tahun 1845-1867



Sumber: P. Bleker, *Nieuwe Bijdragen tot de Kennis, der Bevolking Statistiek van Java* (KITLV Nederlandsche Indie's Gravenhage: M. Nijhoff, hlm. 133-137).

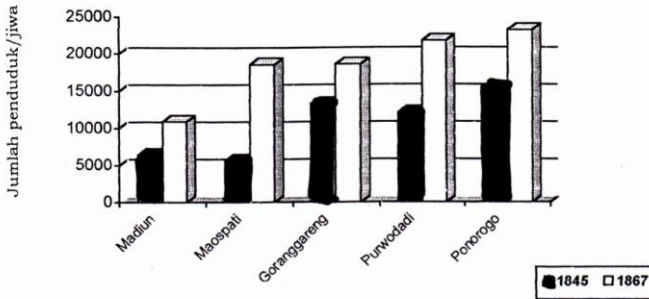
Lonjakan jumlah penduduk tertinggi ternyata di wilayah perkebunan kopi. Menurut Ben White, adanya tenaga kerja wanita di perkebunan-perkebunan kopi mengakibatkan berhentinya proses menyusui pada anak-anak yang ditinggalkannya. Secara biologis berhentinya proses menyusui mengakibatkan tingkat kehamilan tinggi. Para petani berpendapat, dengan banyak anak dapat membantu mencari nafkah. Banyaknya tenaga kerja wanita di perkebunan kopi

mempercepat proses pertumbuhan penduduk, hal ini disebabkan pendeknya proses menyusui. Berhentinya pemberian ASI pada bayi menyebabkan ibu cepat hamil kembali. Kondisi ini terjadi di wilayah perkebunan *Uteran, Kanigoro, Jogorogo, Sineh, Balepanjang, Bulu, Pulung, Arjowinangun, Sumoroto, Jebeng dan Parang* (Laporan Hasil Perkebunan Kopi Tahun 1859-1863).

Wilayah perkebunan tebu juga mengalami lonjakan jumlah penduduk, hal ini disebabkan tanah-tanah perkebunan tebu merupakan tanah yang subur. Disamping itu tanah-tanah yang ada merupakan milik komunal. Petani tidak mengalami kesulitan dalam kepemilikan tanah, begitu juga dalam hal pewarisan karena tanah yang ada merupakan milik bersama. Seperti apa yang dikatakan oleh Ben White bahwa dengan adanya tanah *lanyah* yang dibagikan pada para petani mempermudah terjadinya perkembangan penduduk. Para *numpang* langsung mendapat tanah garapan, *kuli setengah kenceng* juga mendapat tanah garapan tanpa menunggu giliran. Dengan kata lain seluruh petani tidak lagi perlu memikirkan bagaimana caranya membagi *warisan dan tanah* diantara anak-anaknya yang terlalu banyak. Mereka menyadari bahwa kerabat yang besar dapat menolong memikul beban pajak tanah. Perkembangan jumlah penduduk ini dapat dilihat di daerah *Madiun, Maospati, Goranggareng, dan Purwodadi*. Khusus daerah *Ponorogo* pertumbuhan jumlah penduduk dipengaruhi oleh factor *internal migration*. Para petani dari *Distrik Madiun* pada musim tanam sampai penebangan tebu banyak didatangkan ke *Distrik Ponorogo*. Migrasi ini disebabkan *pabrik gula Kanigoro dan Pagotan* yang berada di *Afdeling Madiun* membuka penanaman tebu di *Afdeling Ponorogo*. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik IV.

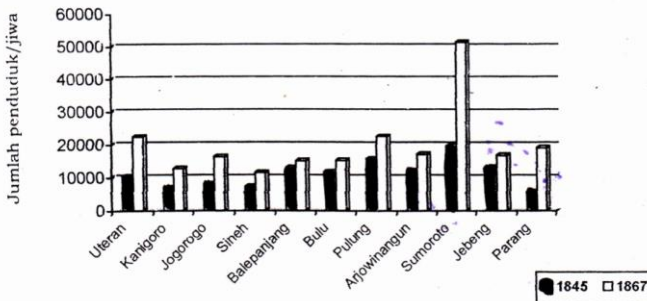
Grafik IV

Pertumbuhan Penduduk di Wilayah Perkebunan Tebu Tahun 1845-1867



Grafik V

Pertumbuhan Penduduk di Wilayah Perkebunan Kopi Tahun 1845-1867



Sumber: P. Bleker, *Nieuwe Bijdragen Tot de Kennis, der Bevolking Statistiek van Java* (KITLV Nederlandsche Indie's Gravenhage: M. Nijhoff, hlm. 133-137).

G. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa awal munculnya filosofi "*banyak anak banyak rizki*" pada masyarakat Jawa masa *cultuurstelsel* sebagai akibat beratnya tekanan pajak tanah yang ditanggung oleh keluarga dalam

masyarakat Jawa. Secara tidak sadar masyarakat Jawa didesain oleh pemerintah colonial untuk didorong memiliki banyak anak guna memenuhi besarnya tenaga kerja untuk tanaman *agroindustri* (kopi, tebu dan lain-lain). Cara yang dipergunakan untuk memudahkan pertambahan jumlah penduduk dengan memunculkan kebijakan-kebijakan, antara lain: 1) komunalisasi sawah, dengan merubah pola kepemilikan tanah pada masyarakat Jawa dari kepemilikan individu menjadi milik bersama. Kebijakan tersebut berdampak bahwa masyarakat sudah tidak memikirkan lagi pembagian warisan dalam keluarganya, sehingga tidak perlu membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga; 2) perubahan *sistem apanage* kesistem *agroindustri* memerlukan intensifikasi tata guna tanah untuk memperoleh keuntungan maksimal sebagai reaksi terhadap permintaan pasar. Secara otomatis diperlukan tenaga kerja yang banyak, baik dalam proses *agroindustri* maupun *infrastrukturnya* (pembangunan jalan, jembatan, pabrik dan lain-lain); 3) adanya tenaga kerja wanita di perkebunan-perkebunan kopi mengakibatkan berhentinya proses menyusui pada anak-anak yang ditinggalkannya. Secara biologis berhentinya proses menyusui mengakibatkan tingkat kehamilan tinggi. Para petani berpendapat, dengan banyak anak dapat membantu mencari nafkah. Ada keuntungan ganda bagi pemerintah colonial dengan memunculkan kebijakan-kebijakan tersebut di atas. Pertama, pemerintah colonial mendapat tenaga kerja yang besar. Kedua, prestise pemerintah colonial di mata dunia dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan sebuah keberhasilan dalam memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Sumber Manuskrip

Arsip Nasional, Map No.6.

Laporan Hasil Perkebunan Kopi Tahun 1859-1863.

Sumber Resmi Tercetak pada Masa Belanda

Eindresumé, vol. III, Bijlage J., 143.

Eindresumé I, Lampiran A.

Kolonial verslag, 1877: 181.

Buku

Bleeker, P., 1870, *Bevolking Statistiek van Java*, KITLV Nederlandsche Indies Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Brugmans, I.J., 1938, *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsche Indie*, Groningen-Batavia: J.B. Wolters Maatschappij.

Fasseur, C., 1975, *Kultuurstelsel en koloniale baten: den Nederlandsche exploitatie van Java, 1840-1860*, Leiden: Universitaire Pers.

Holton, R.J., 1985, *The Transition from Feodalism to Capitalism*, London: Macmillan.

Latifatul Izzah, 2001, *Karesidenan Madiun Pada Masa Kultuurstelsel, 1830-1870: Studi tentang Perubahan Pola Penguasaan Tanah, Demografis, dan Diferensiasi Kerja*, dalam Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ricklefs, M.C., 1998, *Sejarah Indonesia Modern, Terj. Dharmono Hardjowidjojo*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rouffaer, G.P., 1931, *Vorstenlanden, Adatrechtbundels*, 34.

White, Ben, 1973, *Demand for Labour and Population Growth in Colonial Java*, in *Human Ecology*.